

EVALUASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang)

Oleh :

Isnan Murdiansyah
STIE Widya Gama Lumajang

ABSTRACT

The biggest issue of national economic development is the high rate of poverty. Several efforts and solutions in the form of financial help program had been conducted by the government to overcome poverty problems, especially through an integrated act to overcome poverty program (Gerdu-Taskin). This program aimed to decrease poor-people through self-independency using human developmental approach, enterprises, and environment; on 2007, which was developed to be the link of social economic security (Japes). Malang, one of district in East Java, became one of district who got financial help program. Therefore, this study aimed to examine the role of Gerdu-Taskin in powering up the poor-people and identifying each motivating and demotivating factors for Gerdu-Taskin to increase social welfare in the District of Malang. This study was taken place at Pandanrejo village, the subdistrict of Pagak, the District of Malang. It used explorative study by applying descriptive qualitative method. The result of study investigated that; first, the Gerdu-Taskin through the Financial Controlling Unit effectively played important role in powering up and improving the people-self-independency, especially in the study area at the south of Malang. Second, the implementation of Gerdu-Taskin program through “Anggrek” Financial Controlling Unit is as one of study area that effectively played important role in improving the rural-area institutional development. Third, the Gerdu-Taskin played important role in improving the social welfare in the District of Malang. The positive correlation between the both is able to be a role model to overcome poverty issues at other areas. Fourth, there are some problems appeared on the process of implementation of Gerdu-Taskin in Malang were the limited funds, corruption, the troubled-funds, the strong intervention of rural-area apparatus, the low support from both rural-area institution and the rural-area government, and the coordination among the manager programs in the district/ city had not yet gone well. Fifth, there were some advantages in Gerdu-Taskin program which was conducted by UPK in study area of Malang were the circulating of funds went well, the competency of staff management was professional, skillful, especially the people around the area.

Keywords: Poverty, the Improvement of Peoples’ Abilities, and the Gerdu-Taskin Program.

A. PENDAHULUAN

Salah satu indikator utama keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001). Karena kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin sangat lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Dalam konteks demikian, kemiskinan dengan demikian erat kaitannya dengan kapasitas dan jumlah penduduk dalam suatu daerah itu sendiri.

Sehubungan dengan itu, salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar dan wilayah terluas di Jawa Timur adalah Kabupaten Malang. Luas wilayah Kabupaten Malang sendiri sebesar 3.534,86 Km² dan dengan jumlah penduduk sejumlah 2.419.822 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,08 persen. Selain itu, Kabupaten Malang merupakan salah satu barometer perekonomian di Jawa Timur, hal ini terlihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang yang menduduki peringkat 6 dari 33 kabupaten/kota yang ada di propinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Pasuruan. Cukup tingginya aktivitas ekonomi di Kabupaten Malang tidak terlepas dari tingginya aktivitas masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Malang. Hal ini berkonstelasi secara positif dengan program pengentasan kemiskinan yang dalam hal ini dapat bermuara pada keberhasilan atau kegagalan.

Namun demikian, kenyataannya jumlah

penduduk miskin di Kabupaten Malang pada tahun 2008 masih mencapai 163.911 KK. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2007 yang sebesar 154.190 KK. Bila dihitung dalam satuan jiwa, maka jumlahnya meningkat tajam sebesar 568.591 jiwa atau sekitar 23,4 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten Malang. Hal ini juga meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang jumlahnya masih sebesar 555.971 jiwa.

Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah khususnya Kabupaten Malang dalam mengentaskan masyarakat miskin, mulai dari bantuan dan perlindungan sosial rumah tangga miskin hingga pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dalam hal ini ada dua kategori penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan.

Pertama, adalah *rescue* (upaya penyelamatan), yakni upaya jangka pendek yang bertujuan menyelamatkan rumah tangga miskin agar tidak semakin terpuruk seperti akibat kenaikan harga BBM. Program ini tidak dimaksudkan mengentaskan penduduk miskin, tapi hanya mencegah masyarakat miskin tidak semakin terpuruk, dan juga mencegah agar kemiskinan tidak berekses ke hal-hal lain. Tujuan utamanya memberikan penghasilan bagi keluarga miskin agar dapat bertahan hidup (*charity*).

Kedua, *recovery* (pemulihan), yaitu upaya jangka panjang untuk pengurangan kemiskinan, bersifat bergulir, penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Upaya ini dilakukan melalui Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin), Program Pengembangan Ekonomi Kawasan, P3EL, PWTAD, dan lainnya. Sedangkan program Gerdu-Taskin sendiri yang bertujuan mengentaskan penduduk miskin melalui proses pemandirian masyarakat dengan pendekatan

pemberdayaan manusia, usaha dan lingkungan, yang pada 2007 dikembangkan menjadi Jaring Pengaman Ekonomi Sosial (Japes).

Bila ditinjau, meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan khususnya program Gerdu-Taskin yang telah digulirkan berjalan, namun ancaman meningkatnya wabah kemiskinan masih tetap harus diwaspadai. Ketimpangan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat di seluruh wilayah yang terjadi selama ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah juga menjadi sangat rentan. Akibatnya, dampak masalah ketimpangan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat tersebut menimbulkan problem kemiskinan yang berkepanjangan

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui sejauh mana suatu program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan, maka seyogyanya pemerintah mengevaluasi model-model program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan penguatan kelembagaan.

Mengevaluasi program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat setidaknya diarahkan sebagai berikut :

1. Menyusun pola penguatan kelembagaan dan manajemen usaha ekonomi masyarakat yang efektif melalui pendekatan kelompok usaha
2. Menyusun rekomendasi bagi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang efektif di Jawa Timur.
3. Menyusun *training design* bagi tokoh-tokoh riil dalam masyarakat.

Rekomendasi yang diharapkan dari evaluasi ini adalah rancangan program

pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang efektif dan efisien serta langkah-langkah strategis implementasinya di untuk masa mendatang. Bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPERMAS), hasil evaluasi ini diharapkan dapat digunakan untuk menyusun program-program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat secara lebih tepat, efektif, dan efisien.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak program Gerdu-Taskin dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Malang?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong dan menghambat program Gerdu-Taskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji peranan program Gerdu-Taskin dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Malang.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat program Gerdu-Taskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi pemerintah dan masyarakat sebagai *stakeholder* dalam pembangunan ekonomi daerah khususnya di Kabupaten Malang berupa pemahaman dan pengetahuan mengenai berbagai permasalahan dan tantangan dalam

program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malang. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk mengambil dan merumuskan kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang di Kabupaten Malang.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kemiskinan

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai kelaparan, ketiadaan tempat berlindung, ketidakmampuan berobat ke dokter jika sakit, tidak mempunyai akses ke sekolah dan buta huruf, tidak mempunyai pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidakmampuan mendapatkan air bersih, ketidakberdayaan, serta tidak ada keterwakilan dan kebebasan. Sementara menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1981, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Meskipun miskin bukan kenyataan baru dalam masyarakat, namun sampai saat ini definisi kemiskinan masih bersifat problematik karena sifatnya yang begitu rumit dalam beberapa tataran variabel pengukuran. Belum ada definisi baku yang dapat diterima bersama oleh para ahli seputar kemiskinan. Namun dengan memperhatikan definisi-definisi teoritis yang dikemukakan diatas, maka definisi operasional dari kemiskinan yang diutarakan disini adalah kondisi seseorang atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang diperlukan

untuk dapat hidup layak dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, sesuai dengan hak-hak dasar mereka.

Menurut BAPPENAS (2004), hak-hak dasar masyarakat miskin ini yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) beberapa daerah di Indonesia diantaranya: (1) hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) hak untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) hak untuk memperoleh rasa aman; (4) hak memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, papan) yang terjangkau; (5) hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) hak untuk memperoleh akses atas kesehatan; (7) hak untuk memperoleh keadilan; (8) hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) hak untuk berinovasi, serta (1) hak untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan yang baik.

Orang yang setidaknya bisa memenuhi hak-hak dasar tersebut dianggap tidak miskin, sedangkan yang tidak dapat memenuhinya maka dapat dikategorikan miskin. Meskipun pada kenyataannya, untuk dapat hidup layak berbeda untuk tiap individu tergantung pada usia, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemiskinan juga memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumberdaya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar, serta kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan menggelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta dalam kehidupan, sosial, dan budaya.

Ukuran Kemiskinan

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per-kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedang pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Dengan kata lain, BPS menggunakan dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dan pendekatan *head count index*. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan *head count index* merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut "batas garis kemiskinan", yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non-makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (*food line*) dan garis kemiskinan non-makanan (*non food line*).

Ukuran kemiskinan yang dipakai oleh Bank Dunia, yaitu mereka yang menyandarkan hidupnya pada pendapatan kurang dari 2 dolar AS per hari (Sumodiningrat, 2002). Sedangkan ukuran kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu mereka yang mempunyai penghasilan kurang dari 1 (satu) dolar AS per hari untuk warga perkotaan dan 80 sen dolar AS per hari bagi warga pedesaan.

Tahun 2005, BPS memunculkan indikator kemiskinan baru dalam rangkaian kegiatan yang disebut sebagai Pendataan Kemiskinan dengan Indikator Baru (PKIB). Dibandingkan dengan indikator sebelumnya, indikator PKIB diupayakan lebih operasional. Dengan menggunakan 11 variabel yang akan diukur yang dikelompokkan dalam 4 kelompok utama, yaitu: kelompok sandang, kelompok pangan, kelompok papan dan kelompok lainnya. Skor dari 11 variabel yang diukur kemudian digunakan untuk menentukan Indeks Rumahtangga Miskin (BPS Jatim, 2005).

$$I_{RM} = \left[\frac{\sum_{i=1}^{11} S_i w_i}{100} \right]$$

Dimana, I_{RM} = indeks rumahtangga miskin
 S_i = skor variabel i
 w_i = penimbang setiap variable (total penimbang = 100)

Nilai I_{RM} memiliki nilai terendah 1 dan tertinggi 3, makin tinggi nilai I_{RM} maka makin miskin suatu rumahtangga. Rumahtangga dengan skor I_{RM} 1 sampai $(\bar{X} - \sigma)$ termasuk kategori I (tidak miskin atau mendekati miskin), skor $(\bar{X} - \sigma)$ sampai $(\bar{X} + \sigma)$ termasuk kategori II (miskin) dan skor $(\bar{X} + \sigma)$ sampai 3 termasuk kategori III (sangat miskin). Hasil PKIB BPS tahun 2001 menunjukkan bahwa kategori I mempunyai rentang skor antara 1 sampai 2,44, kategori II antara 2,45 sampai 2,50, kategori III antara 2,51 sampai 3.

Walaupun masih memiliki kelemahan, seperti kaburnya jarak antara tiap kategori, namun indikator PKIB ini terasa cukup operasional dan cukup mampu merangkum tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga aspek-aspek lainnya. Sesuai dengan apa yang dikatakan Amartya Sen, bahwa kekurangan secara ekonomi bukanlah satu-satunya jenis kemiskinan yang merapuhkan kehidupan manusia, karena kehidupan manusia

dimiskinkan dalam cara yang berbeda. Menurut Sen, ukuran kemiskinan senantiasa jauh melewati batas-batas dimensi ekonomi, karena dalam kemiskinan ekonomi selalu melekat kemiskinan secara total: miskin pendidikan, miskin kesehatan, bahkan miskin secara politik.

Penyebab Kemiskinan

Nasikun (2001) menyoroti beberapa sumber dan penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. *Policy Induces Processes*. Proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitasnya justru melestarikan.
2. *Socio Economic Dualism*. Yakni negara eks koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang subur dikuasai para petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. *Population Growth*. Perspektif yang didasari oleh teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur, sedang penambahan pangan seperti deret hitung.
4. *Resources Management and The Environment*. Adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang dan dapat menurunkan produktivitas.
5. *Natural Cycles and Processes*. Yakni kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalkan yang tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir, namun jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus menerus.
6. *The Marginalitation of Woman*. Adalah

peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas dua sehingga akses dan penghargaan lebih rendah ketimbang laki-laki.

7. *Culture and Etnik Factor*. Bekerjanya faktor budaya dan etnik yang eksis memelihara kemiskinan. Misalnya pola hidup yang konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen, serta adat istiadat saat upacara adat yang dapat menyedot biaya mahal.
8. *Exploitative Intermediation*. Keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
9. *Internal Political Fragmentation and Civil Stratfe*. Yakni suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dan dapat menjadi penyebab kemiskinan. Dan yang terakhir adalah:
10. *International Processes*. Yakni bekerjanya sistem-sistem internasional seperti kolonialisme dan kapitalisme yang membuat banyak negara menjadi miskin.

Menurut pandangan secara umum, kemiskinan jika dilihat dari faktor penyebabnya, maka dibedakan atas : kemiskinan kultural, natural dan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti: malas, tidak disiplin, boros dan lain sebagainya. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti: karena cacat, sakit, lanjut usia, dan karena bencana alam. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti: distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak adil, korupsi dan kolusi, serta tatanan perekonomian yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu.

Teori yang berbasis pada sosio-antropologis melihat kemiskinan sebagai

akibat faktor kultural yang menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan. Sedangkan yang berbasis ekonomi melihat kemiskinan sebagai akibat faktor natural seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, dan faktor struktural seperti kesenjangan kepemilikan faktor produksi, rendahnya pembentukan modal masyarakat dan rendahnya perangsang untuk penanaman modal.

Kebijakan Dasar Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah mempunyai peranan besar dalam usaha menanggulangi kemiskinan di tanah air. Untuk itu diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti *cost effectiveness*-nya tinggi. Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang pro kemiskinan.
2. Pemerintahan yang baik, serta
3. Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan (Tambunan, 2006). Prayitno dan Santosa (1996), langkah-langkah penanggulangan kemiskinan senantiasa perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :

1. Program penanggulangan kemiskinan hanya berjalan baik dan efektif apabila ada suasana tenang dan stabil. Kestabilan mutlak diperlukan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan karena pada dasarnya upaya penanggulangan kemiskinan adalah upaya untuk menciptakan ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial dan politik.
2. Program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif

apabila pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Keluarga kecil yang sejahtera adalah salah satu dari faktor yang kondusif untuk mencapai sasaran menanggulangi kemiskinan.

3. Program penanggulangan kemiskinan harus dikaitkan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang tetap lestari dan terjaga dengan baik memungkinkan distribusi kesejahteraan antar warga masyarakat secara merata.
4. Program penanggulangan kemiskinan harus merupakan program yang berkelanjutan, yaitu program yang dapat terus-menerus berjalan dan dapat mandiri. Hal ini berarti program penanggulangan kemiskinan harus dilandaskan pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar dari suatu kegiatan. Upaya meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu :
 - a. Akses terhadap sumber daya.
 - b. Akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien.
 - c. Akses terhadap pasar. Produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah. Ini berarti bahwa penyediaan sarana produksi dan peningkatan keterampilan harus diimbangi dengan tersedianya pasar secara terus-menerus.
 - d. Akses terhadap sumber pembiayaan.
5. Pendelegasian wewenang atau desentralisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang diupayakan pada tingkatan

pemerintahan serendah mungkin. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat di daerah itu sendiri. Dalam hubungan ini, pemerintah daerah harus mengambil peranan yang lebih besar lagi karena mereka yang paling mengetahui mengenai kondisi dan kebutuhan penduduk di kantong-kantong kemiskinan di daerahnya. Semakin dekat pelaksana proyek dan kegiatan dengan kelompok sasaran, maka akan semakin efektif.

6. Tekanan yang paling utama seyogyanya diberikan pada perbaikan pelakunya, terutama manusianya (*invest in people*) menyangkut aspek pendidikan dan kesehatan. Keduanya berkaitan dengan peningkatan akses secara merata dan sekaligus mutu yang lebih baik.
7. Pelayanan bagi orang jompo, penderita cacat, yatim piatu, dan kelompok masyarakat lain yang memerlukan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya menanggulangi kemiskinan. Program ini bersifat khusus dan dilaksanakan secara selektif. Langkah yang diperlukan adalah meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan jangkauan program tersebut. Searah dengan itu, pengembangan sistem jaminan sosial secara bertahap perlu terus ditingkatkan.

Model Solusi Pengentasan Kemiskinan

Pengalaman di negara-negara Asia menunjukkan bahwa model mobilisasi perekonomian pedesaan untuk memerangi kemiskinan, yaitu: *Pertama*, mendasarkan pada mobilitas tenaga kerja agar terjadi pembentukan modal di pedesaan. Tenaga kerja yang masih belum didayagunakan pada rumah tangga petani kecil dan gurem merupakan sumberdaya yang tersembunyi dan potensi tabungan.

Alternatif cara untuk memobilisasi tenaga kerja dan tabungan pedesaan diantaranya adalah: *Pertama*, menggunakan pajak langsung atas tanah, seperti yang dilakukan di Jepang. *Kedua*, dilakukan dengan menyusun kerangka kelembagaan di pedesaan yang memungkinkan tenaga kerja yang belum didayagunakan untuk pemupukan modal tanpa perlu menambah upah. Ini persis yang dilakukan Cina yang menerapkan sistem kerjasama kelompok dan *brigades* ditingkat daerah yang paling rendah (*communes*). Dengan metode ini ternyata memungkinkan adanya kenaikan yang substansial dalam intensitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Model *kedua*, menitik beratkan pada tranfer daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar. Ide bahwa penawaran tenaga kerja yang tidak terbatas dari rumah tangga petani kecil dapat meningkatkan tabungan dan formasi modal lewat proses pasar. Model *ketiga*, menyoroti pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor yang memimpin (Mellor, 1976), Model ini dikenal dengan nama Model Pertumbuhan Berbasis Teknologi, atau *Rural-Led Development*. Model *keempat*, menyoroti dimensi spasial dalam menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan bisa diatasi dengan cara kemudahan dalam mengakses dua bidang, yaitu: 1) bidang ekonomi dan 2) bidang sosial (Kuncoro, 2004).

Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Masalah kemiskinan menyangkut dengan kesejahteraan sosial. Maka, berdasarkan analisis dan kajian kesejahteraan sosial, perlu adanya usaha-usaha kesejahteraan sosial dalam mengentaskan kemiskinan tersebut. Namun dalam ranah bahasan ini, kebijakan pengentasan kemiskinan selama ini

masih didesain dengan corak sentralistis oleh pemerintah pusat, khususnya yang diwakili oleh Bappenas. Mekanismenya, Bappenas merancang program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan dukungan alokasi dan distribusi anggaran APBN. Pada masa otonomi sekarang, pemerintah daerah mengalami disfungsi dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan. Program yang dikenal oleh daerah hampir semuanya dari pusat dan disertai dengan kriteria dari pusat.

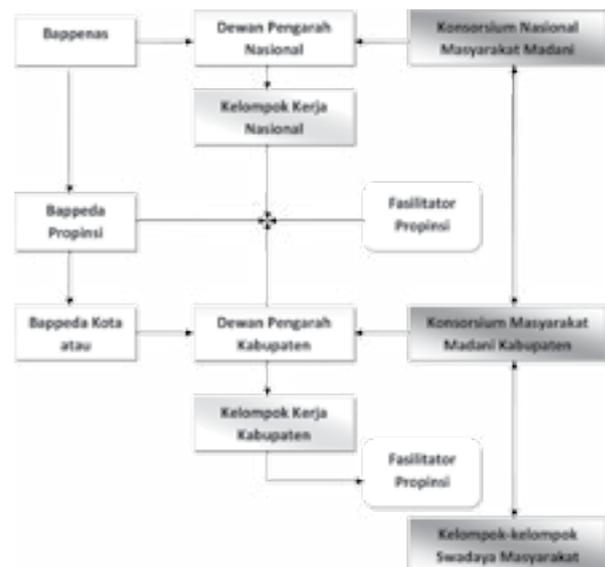
Sedangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yang dijadikan landasan dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, secara nyata telah mencantumkan istilah pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan, seperti yang tercantum sebagai berikut: Strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan yang telah ditetapkan yaitu :

- (1) *Pemberdayaan* : peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial untuk memberikan kepercayaan dan peluang kepada masyarakat, Organisasi Sosial, LSM, dunia usaha dan penyandang masalah sosial dalam mencegah dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya serta merealisasikan aspirasi dan harapan mereka dalam mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya;
- (2) *Kemitraan*: kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dan pelaksanaan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra dan mengoptimalkan pelayanan-pelayanan yang bersifat terpadu;
- (3) *Partisipasi*: prakarsa, peranan dan keterlibatan semua pihak pelaku

pembangunan dan penerima pelayanan, lingkungan sosial dan penyedia pelayanan dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

Namun demikian, makna pemberdayaan dan implikasinya terhadap proses pelaksanaan program yang menggunakan strategi pemberdayaan belum sepenuhnya dipahami. Gambaran tentang program pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pengelolaan dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1 Struktur Organisasi Program Pemulihan Keberdayaan Masyarakat



Sumber: Ismawan, 1998

Pada era sentralisasi sendiri, pemberdayaan biasanya didistorsikan pemaknaannya menjadi lebih sempit, yakni sebagai upaya mendorong masyarakat untuk menggunakan sumber-sumber yang disediakan oleh pemerintah dalam konteks usaha ekonomi, dan juga bertendensi sebagai suatu usaha untuk menarik simpati masyarakat

bagi kepentingan politik. Dengan demikian, pemberdayaan juga dapat dikatakan masih dimonopoli dan direduksi pemaknaannya serta orientasinya sebagai perspektif politik dan ekonomi daripada perspektif sosial dan budaya.

Gambarannya dapat dilihat dari adanya usaha untuk memobilisasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang datang dari atas untuk kepentingan politik tertentu dan mempertahankan keberhasilan pertumbuhan ekonomi dengan kurang memberikan peluang agar inisiatif tumbuh dari masyarakat, khususnya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber kehidupan dan pengambilan keputusan.

Maka, sebenarnya keberhasilan program pengentasan kemiskinan adalah terletak pada pengidentifikasian secara akurat terhadap kelompok dan wilayah yang ditargetkan (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002). Sedangkan kritik yang dilontarkan terhadap program pengentasan kemiskinan antara lain mengenai penetapan sasaran, yakni dalam penentuan penduduk yang benar-benar miskin dan membutuhkan bantuan. Dan pendekatan yang hendak dilakukan adalah hendaknya berdasarkan profil kemiskinan dan *people driven*. Makna dari pernyataan ini bahwa rakyat adalah aktor utama dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan politis (*bottom up*).

Upaya penanggulangan kemiskinan yang lalu perlu dikoreksi secara mendasar diantaranya: (1) kebijakan yang terpusat dan seragam; (2) memposisikan masyarakat sebagai obyek dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan; (3) asumsi permasalahan dan penanggulangan kemiskinan yang sering dipandang sama (*one-fit-for-all*); (4) kurang memperhatikan keragaman budaya; (5) kelompok sasaran antara program yang satu dan program lainnya seringkali tumpang tindih; (6) kebijakan yang bersifat

sektoral dan daerah kurang diberdayakan dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan.

C. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian pada kajian ini adalah program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang Selatan, Provinsi Jawa Timur, yakni Program Gerdu-Taskin.

Ruang Lingkup Penelitian

Kegiatan evaluasi program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini berfokus pada dua lingkup utama, yaitu: ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah adalah pemerintah Kabupaten Malang dan instansi pendukung lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang yang berkaitan dengan kajian ini, serta wilayah lain yang meliputi berbagai daerah yang menjadi kantong kemiskinan di berbagai daerah di Kabupaten Malang. Ruang lingkup materi, meliputi kajian empirik berupa analisis ekonomi makro dan program pengentasan kemiskinan, serta kajian teori tentang pemberdayaan masyarakat.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder berasal dari beberapa instansi yang berwenang dan berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan seperti Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber data sekunder lainnya yang berkaitan. Sedangkan data primer

diperoleh langsung melalui wawancara secara mendalam (*depth interview*), serta *stakeholder* di wilayah penelitian yang telah ditetapkan.

Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan secara mendalam guna menjawab beberapa tujuan dalam penelitian ini seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Proses analisis data mengacu pada *interactive model of analysis* yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data model interaktif terdiri dari tiga komponen utama analisis yang dilaksanakan secara simultan sejak atau bersamaan dengan proses pengumpulan data. Komponen-komponen tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan pada Tata Kelola Program Gerdu-Taskin

Pelaksanaan program Gerdu-Taskin telah terbukti mampu memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin berupa: (i) pengurangan beban dan peningkatan pendapatan, (ii) menggerakkan usaha sektor riil di pedesaan, (iii) mengurangi praktik rentenir di pedesaan melalui penyediaan lembaga keuangan mikro yang melayani pinjaman modal secara mudah, cepat dan murah, (iv) terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan, (v) terjadinya proses pembelajaran sosial (*social learning*), dan (vi) menumbuhkan suasana kegairahan praktik demokrasi dalam pengambilan keputusan pembangunan. Program Gerdu-Taskin pada level makro Jawa Timur memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2001 misalnya, sebesar 7.267.843 jiwa (20,91%) dan pada tahun 2004 berkurang menjadi 6.979.565 jiwa (19,10%). Namun

demikian akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bencana alam di beberapa daerah, pada tahun 2005 angka kemiskinan melonjak menjadi 8.390.996 jiwa (22,51%) dan pada tahun 2006 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 7.455.655 jiwa (19,89%).

Sedangkan organisasi Pengelola Program Gerdu Taskin terstrata mulai dari tingkat propinsi sampai desa dengan struktur sebagai berikut:

1. Organisasi Tingkat Propinsi
 - a. Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Propinsi. Ketua KPK adalah Wakil Gubernur, dan secara fungsional dikoordinasikan oleh BAPPEPROP.
 - b. Sekretiat Tetap (Sektap) Propinsi, diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Propinsi, dengan anggota dari Dinas/Instansi terkait lainnya.
 - c. Tim Pendamping Propinsi (TPP), adalah Tim pendukung KPK dalam pengelolaan Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) Propinsi. Mereka terdiri dari tenaga ahli dari Perguruan Tinggi dan LSM yang berpengalaman di bidang pengembangan masyarakat (*community development*).
2. Organisasi Tingkat Kabupaten/ Kota
 - a. Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) kabupaten/ kota, yang bertindak sebagai pengarah, perencana, pelaksana, dan pengendali program, dengan susunan Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Masyarakat kabupaten/ kota serta dinas terkait lainnya.
 - b. Penanggung jawab Operasional, yang ditetapkan oleh Bupati/ Wali Kota.
 - c. Koordinator tenaga pendamping, yakni tenaga pendukung KPK dalam

- operasional program di Kabupaten/ Kota.
- d. Tim Fasilitasi Kecamatan (TFK) yang bertanggung jawab dalam koordinator pelaksana.
- 3. Organisasi Tingkat Desa/ Kelurahan
 - a. Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang ditunjuk berdasarkan musyawarah desa
 - b. Tim pelaksana yang merupakan pelaksana kegiatan
 - c. Tenaga pendamping masyarakat yang bertugas dalam pendampingan UPK.

Dampak Program Gerdu-Taskin Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

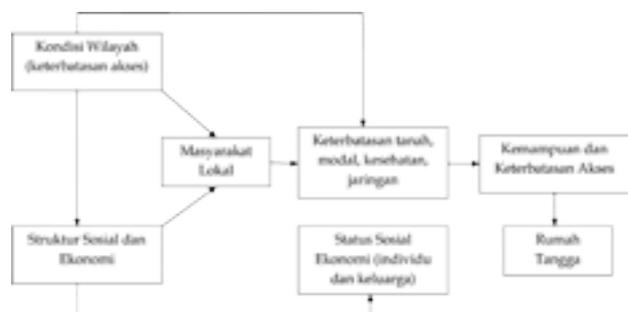
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu konsep pembangunan masyarakat, di mana secara teknis merupakan cara untuk membentuk atau membuat berdaya pada suatu obyek, yang dalam hal ini adalah kelompok rumah tangga miskin (RTM). Dengan demikian ketika mengkaji masyarakat miskin sebagai obyek, maka tentunya pemberdayaan ditujukan untuk membuat berdaya RTM tersebut.

Sebagaimana dalam penelitian ini yang memfokuskan pada program Gerdu Taskin dan para RTM sebagai objek program. Dalam tataran definitif maupun implementatif, pemberdayaan tidak hanya melibatkan kemampuan/keberdayaan secara fisik (kepemilikan sumber daya/faktor produksi), tetapi juga non fisik (aktualisasi diri dan kepercayaan diri) dari RTM yang selama ini masih terdiskreditkan. Sehingga program pemberdayaan ditujukan untuk menghilangkan ketergantungan, bahwa syarat mutlak program pemberdayaan adalah orientasinya yang selalu tertuju kepada kemandirian, kesinambungan, dan keberlanjutan.

Namun demikian, program pemberdayaan tersebut atas masyarakat

miskin masih terkendala oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal seperti kondisi geografis, khususnya dalam hal ini di daerah Kabupaten Malang Selatan yang aksesnya masih sangat sulit, selain itu juga kondisi struktur sosial dan ekonomi. Sedangkan faktor internal seperti keterbatasan akses permodalan, kesehatan yang memadai, jaringan usaha dan sosial, juga status sosial ekonomi pada individu dan keluarga. Beragam kondisi ini dapat dilihat pada gambar 6.1 berikut:

Gambar 6.1. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Malang



Sumber: elaborasi

Terlepas dari semua itu, setidaknya dalam telaah kali ini akan dipaparkan dampak program Gerdu Taskin yang telah dijalankan terhadap masyarakat miskin.

Dampak Program Gerdu-Taskin Terhadap Kemandirian Usaha Masyarakat Miskin

Konsekuensi dilaksanakannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan jumlah kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan dan desa terus bertambah. Lingkup kawasan pedesaan hampir sekitar 82 persen wilayah Indonesia yang di dalamnya sekitar 131,8 juta jiwa atau lebih dari 56,86 persen penduduk di Indonesia bertempat tinggal dan menggantungkan hidup di perdesaan.

Dilihat dari segi ketenagakerjaan terdapat

60,1 persen atau sebesar 37,05 juta pekerja produktif yang ada di perdesaan bekerja di sector pertanian (Sakernas-BPS, Agustus 2009), yang merupakan kekuatan ekonomi pedesaan yang sangat potensial. Selain aspek demografi, potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) menjadi daya magnet menarik dalam menggairahkan dan menggerakkan ekonomi lokal dan sektor riil lainnya di desa.

Namun sayangnya, realita menunjukkan jumlah kemiskinan dan pengangguran terbesar nasional berada di desa. Hal ini didukung data yang menyebutkan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) wilayah pedesaan dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Selain itu, dengan sempitnya lapangan kesempatan kerja di desa, sementara kondisi masyarakatnya hampir sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dengan upah rendah, rata-rata kepemilikan lahan yang sempit, produktivitas pertanian rendah, dan terbatasnya akses masyarakat pedesaan terhadap pelayanan umum, semua faktor tersebut turut memberikan kontribusi terhadap masih tingginya angka kemiskinan di pedesaan di Kabupaten Malang.

Disinilah peran program pengentasan kemiskinan dibutuhkan untuk menciptakan pemerataan pendapatan di daerah dan mengurangi semakin lebarnya ketimpangan desa-kota. Peran program Gerdu Taskin dalam pembangunan desa adalah berorientasi pada kemandirian usaha keluarga rumah tangga miskin (RTM) yang dijalankan secara mandiri.

Program Gerdu Taskin juga berkonsep pada desa mandiri. Konsep desa mandiri telah tertuang dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan secara rinci dan lengkap melalui PP No. 72/2005 tentang Desa yang memberikan ruang kebebasan kepada desa untuk menjalankan pembangunan desa (desa membangun) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJM Desa). Rencana Pembangunan desa ini didasarkan atas urusan-urusan wewenang desa, potensi dan inisiatif lokal, dan semangat gotong-royong dan partisipasi masyarakat, sekaligus menyesuainya dengan kearifan lokal setempat.

Salah satu kombinasi antara UU No. 32/2004 dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melahirkan Permendagri No. 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Yakni berisi pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat yang meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, serta penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan, yang dilaksanakan melalui Pusat Pertumbuhan Terpadu Antardesa (PPTAD).

Untuk mencapai tujuan itulah, agenda utama pemerintah dalam pembangunan nasional lebih menitikberatkan pada pembangunan kawasan pedesaan, melalui Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), dan Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu- Taskin). Harapannya mampu memberdayakan dan meningkatkan kemandirian penduduk desa dalam berwirausaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri demi mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran di desa.

Salah satu daerah penelitian dalam evaluasi program Gerdu Taskin ini adalah terletak di Desa Pandanrejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Di desa ini Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan dibentuk melalui sebuah institusi Unit Pengelola Keuangan (UPK) bernama UPK Anggrek. Dalam proses operasionalnya, UPK Anggrek ini melayani jasa transaksi keuangan atau bidang transaksi lain yang berkaitan

dengan pengembangan usaha produktif dan permodalan melalui pemberian dana simpan pinjam kepada Pokmas dan RTMB untuk mengembangkan usaha dan industri kecil di daerah Pandanrejo. Tercatat terdapat 26 jenis Pokmas dengan berbagai macam jenis usaha dan industri yang ada, umumnya bergerak di sektor riil, seperti: perdagangan, pertanian, peternakan, makanan kecil, dan industri kecil lainnya.

Selain itu, indikator yang menunjukkan keberhasilan program Gerdu Taskin ini dalam meningkatkan kemandirian masyarakat sekitar, antara lain: tingginya tingkat partisipasi minat penduduk dalam meminjam dana modal kepada UPK dan semakin meningkatnya jumlah usaha industri kecil dan tingkat kesejahteraan kemakmuran penduduk desa. Diharapkan dengan semakin meningkatnya jumlah usaha industri kecil di desa akan menumbuhkan spirit jiwa kewirausahaan penduduk demi terciptanya kemandirian dan ketahanan ekonomi perdesaan.

Dari realita yang ada di perdesaan terlihat bahwa masalah kelangkaan modal (*lack of capital*) masih menjadi penghambat utama pembangunan kawasan perdesaan, utamanya masyarakat desa sendiri dalam memajukan desanya melalui pengembangan kewirausahaan demi terciptanya kemandirian usaha di daerahnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan teori kepribadian yang mengarah kepada prestasi yang dikembangkan oleh David Mc Clelland, yang mengatakan bahwa pendorong perkembangan ekonomi adalah semangat kewiraswastaan dari masyarakat. Semangat ini lebih didorong oleh hasrat yang kuat untuk berprestasi. Masyarakat yang tinggi tingkat kebutuhan berprestasinya, pada umumnya akan menghasilkan perkembangan ekonomi yang lebih cepat.

Urgensinya, memberdayakan ekonomi lokal melalui pemberdayaan industri lokal dengan memanfaatkan dana bantuan program

Gerdu Taskin ini, antara lain:

1. Menyerap banyak tenaga kerja. Umumnya industri lokal di daerah menggunakan tenaga kerja yang ada di daerah sekitarnya. Hal ini berpotensi mengurangi angka pengangguran di daerah, ujung-ujungnya mampu mengurangi angka kemiskinan di desa.
2. Menopang ekonomi nasional dalam menghadapi krisis global. Ditengah ketidakpastian ekonomi dunia saat ini akibat krisis global berkepanjangan, yang didukung ramalan IMF yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi di negara-negara kawasan Asia bakal melambat pada 2012. Perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan hingga 0,3 persen ke posisi 7,7 persen. Indonesia sendiri diprediksi turun 0,2 persen, yakni 6,3 persen dari target di 2011 sebesar 6,5 persen. Tentunya hal ini akan berimbas terhadap sektor-sektor usaha, namun industri-industri lokal telah membuktikan dirinya tahan banting menghadapi krisis global 2008. Memiliki potensi yang cukup besar selain industri-industri lainnya, industri lokal ini layak untuk dikembangkan dan dimaksimalkan oleh pemerintah.
3. Mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu ciri khas industri lokal ialah dengan cara mengembangkan dan melestarikan budaya lokal yang disertai dengan penyesuaian terhadap perkembangan trend pasar terbaru yang lebih modern agar menarik minat generasi muda dan pasar internasional. Tentunya hal ini berpotensi mengembangkan ekonomi lokal daerah sehingga diharapkan mampu mempercepat dan menggerakkan sektor-sektor riil di daerah, seperti sektor pariwisata, UKM/IKM, sektor pertanian dan lain-lain.
4. Mempercepat Pemerataan

Pembangunan. Masalah klasik dalam perekonomian nasional adalah ketimpangan/kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Industri lokal sendiri merupakan industri yang menggunakan sumber daya terbarukan sehingga kontribusinya menyentuh beberapa aspek kehidupan, tidak hanya ekonomis semata.

Dampak Program Gerdu-Taskin Terhadap Pengembangan Kelembagaan

Dari hasil survei dan pengamatan lapangan, Program Gerdu Taskin ini melalui lembaga UPK Anggrek muncul sebagai “katalisator” timbulnya potensi kelembagaan baru. Hal ini berimplikasi pada pengembangan dan sebagai pemicu Bergeraknya usaha/ industri kecil demi menopang perekonomian daerah.

Kelemahan kelembagaan desa yang umumnya terletak pada aspek modal sudah bisa diatasi dengan adanya lembaga ini. Selain itu, lembaga ini juga berperan penting sebagai induk dari usaha atau lembaga-lembaga baru yang ada di Desa Pandanrejo. Lembaga atau industri/usaha tersebut antara lain: usaha dagang, warung dan pracangan, pembuatan tempe, mlijo dan tani, dan lain-lain. Lembaga ini juga bisa memainkan peran ganda sebagai koperasi pedesaan dan lembaga keuangan desa. Di samping beberapa lembaga di atas, sebenarnya di Desa Pandanrejo ada beberapa bentuk kelembagaan yang bisa dimunculkan sebagai turunan lembaga UPK Anggrek, antara lain:

- (1) Kelembagaan keuangan mikro (*micro-finance*) untuk mengatasi kelangkaan modal usaha dan kebutuhan konsumsi,
 - (2) Kelembagaan Gabungan Lembaga Tani (Gapoktan),
 - (3) Kelembagaan klinik agribisnis, dan
 - (4) Kelembagaan Kemitraan Bermediasi.
- Melihat sebagian besar masyarakat

Indonesia masih banyak bertempat tinggal di daerah perdesaan, kesuksesan lembaga UPK Anggrek dalam memberdayakan dan mengembangkan kelembagaan di Desa Pandanrejo, Pagak, layak menjadi bahan percontohan bagi desa-desa lainnya.

Program Gerdu-Taskin dan Kesejahteraan Masyarakat

Masalah terbesar dalam pembangunan nasional saat ini ialah semakin tingginya tingkat ketimpangan/kesenjangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi ini salah satu bentuknya dalam ketimpangan antar daerah, hal ini disebabkan mobilisasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Sumber-sumber daya tersebut, antara lain: akumulasi modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki.

Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Melihat fakta ini dapat dikatakan bahwa disparitas regional merupakan konsekuensi dari pembangunan itu sendiri.

Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi hanya di suatu daerah tertentu seperti daerah kota secara langsung berdampak pada disparitas pendapatan antar daerah yang sangat bervariasi. Dimana daerah yang satu mampu memberikan pendapatan yang tinggi, sebaliknya daerah yang lain memberikan pendapatan yang relatif rendah. Imbasnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah juga berbeda-beda. Tak heran bila semakin tingginya tingkat ketimpangan ekonomi nasional turut berperan juga dalam menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Pada titik inilah peranan Program Gerdu Taskin sangat krusial. Dalam implementasinya di Desa Pandanrejo, Program Gerdu Taskin yang dijalankan melalui Lembaga Keuangan

Mikro UPK Anggrek berperan penting dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar baik secara materi maupun fisik. Misalnya melalui pemberian dana simpan pinjam, pemberdayaan manusia, pembuatan jembatan, jamban, relokasi rumah penduduk miskin, pengerasan jalan dan lain-lain.

Timbal baliknya berujung pada semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Indikatornya adalah semakin meningkatnya pendapatan masyarakat, angka harapan hidup, angka partisipasi sekolah, menurunnya angka kematian bayi dan angka buta huruf.

Titik tekan dari UPK ini dengan lembaga perbankan adalah aktifitasnya dalam hal mengelola permodalan. UPK disini ditekankan dalam pemberdayaan masyarakat miskin secara teknis sehingga tidak keluar dari misi dasarnya dalam mengentaskan kemiskinan.

Dengan demikian, indikator keberhasilan sebenarnya tidak hanya terletak pada seberapa besar dana yang sudah disalurkan melalui Program Gerdu Taskin yang telah dijalankan, namun lebih kepada seberapa atau sejauh mana masyarakat miskin yang diberi bantuan dapat menjadi lebih berkembang dengan berbagai indikator yang menyertainya. Beberapa tolak ukurnya adalah perkembangan aset, jumlah produksi, perkembangan usaha, perkembangan jaringan, atau beberapa indikator yang dapat ditentukan di lain waktu.

Gambar 6.2. Orientasi Pengelolaan Program Gerdu Taskin



Sumber: data primer

Bila dilihat orientasi atau titik tekan dari program Gerdu Taskin diatas, maka untuk itu penting artinya bagi pemerintah tingkat desa/ kelurahan dalam manajemen dan dari segi teknis, sehingga diperlukan tenaga profesional seperti pendampingan dan pembinaan. Maka, sangat penting artinya sebuah SDM baik kuantitas maupun kualitasnya. Pendampingan disini dilakukan dengan meyakinkan, memancing, serta merangsang output atau keluaran hasil untuk mengatasi problem masyarakat miskin. Sehingga beberapa indikator yang ditetapkan sebagaimana 6.2 tercapai. Proses ini memerlukan sebuah komunikasi yang instensif antara pendamping program dengan mitra binaan dengan didasarkan rasa saling percaya (*mutually of trust*), (Zubaedi, 2007).

Permasalahan Program Gerdu Taskin

Dalam proses operasionalnya, Program Gerdu Taskin di desa Pandanrejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ini tak lepas dari berbagai masalah. Beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Terbatasnya Modal.

Masalah terbesar dalam pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia selama ini adalah masih terbatas atau kurangnya modal. Akibatnya mereka sendiri sangat sulit untuk berkembang dan berinisiatif dalam mencari dan menemukan potensi sumber pendapatannya sendiri.

Dengan potensi kekayaan SDA dan jumlah penduduk mencapai 2.800 jiwa disertai tingginya minat usaha masyarakat dalam mengembangkan usahanya, seharusnya dibutuhkan dana modal lebih besar lagi dari pemerintah dalam mengembangkan usaha dan industri kecil dalam menggerakkan perekonomian di Desa Pandanrejo. Melihat data yang ada setidaknya

pemerintah telah memberikan kucuran bantuan dana sebanyak 156,7 juta sejak awal berdirinya UPK Anggrek tahun 2005 lalu sampai tahun 2010. Untuk ukuran pengentasan kemiskinan di desa, dana sebanyak itu masih kecil karena sebenarnya anggaran pemerintah per tahunnya untuk pembangunan perdesaan, khususnya pengentasan kemiskinan mencapai miliaran rupiah.

Disinilah nampak lemahnya “*political will*” pemerintah pusat dalam menata anggaran pembangunan desa. Selain itu rendahnya akses masyarakat terhadap permodalan, akan menghambat peningkatan sumber pendapatan masyarakat perdesaan sekaligus menurunkan produktivitas petani. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas petani di perdesaan adalah ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian.

Di lain pihak, potensi kolateral yang dimiliki rumah tangga perdesaan juga masih rendah. Pada titik inilah nampak sekali peranan Program Gerdu Taskin melalui UPK yang ada dalam membantu mengatasi masalah permodalan dan akses permodalan di desa dalam rangka mengembangkan dan memajukan usaha dan industri kecil di Kabupaten Malang.

2. Adanya Pemangkasan Dana.

Dalam proses penyaluran dana Program Gerdu Taskin seringkali dijumpai adanya pemangkasan dana, konsekuensinya dana yang diterima di daerah, utamanya di desa jumlahnya tidak sebesar dana anggaran awal yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Disinyalir dalam proses perjalanan penyalurannya dana tersebut dikorupsi yang berlindung di balik kedok “biaya administrasi”. Tentunya hal ini sangat

merugikan berbagai pihak, utamanya pemerintah desa.

Salah satu penyebabnya ialah masih belum optimalnya penggunaan anggaran akibat minimnya dana riil yang benar-benar bisa digunakan. Masalah ini juga pernah dialami UPK Anggrek dalam suatu periode tertentu, dimana saat itu seharusnya UPK Anggrek menerima dana bantuan pemerintah sejumlah 35 juta namun dalam implementasinya dana riil yang diterima hanya sebesar 16 juta, akibat terjadi pemangkasan dana di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov).

3. Kredit Macet.

Walaupun beberapa UPK sudah memberikan kemudahan dalam bunga kredit simpan pinjam yang seharusnya 10 persen, tapi dalam implementasinya hanya 5 persen, tapi tetap saja masih ada nasabah yang menunggak dalam pembayarannya. Akibatnya timbul kredit macet yang berpotensi mengganggu kelancaran dan stabilitas operasional simpan pinjam UPK Anggrek.

Adanya kredit macet ini diduga karena masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat. Minimnya rendahnya tingkat kesadaran masyarakat ini biasanya berkorelasi positif dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan sehingga dapat mempengaruhi tingkat keberdayaan masyarakat. Penduduk desa yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik banyak berpindah ke daerah perkotaan. Rendahnya kualitas SDM perdesaan juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Di Desa Pandanrejo sendiri sebagai daerah penelitian kebanyakan penduduknya masih lulusan SD bahkan masih banyak

yang buta huruf.

4. Masih kuatnya dominasi para aparat desa pada saat penentuan usulan desa.

Masih kuatnya dominasi para aparat desa berdampak pada saat penentuan prioritas kegiatan, aspirasi warga kurang terserap. Hal ini dibuktikan dengan penunjukan dan pergantian kepengurusan beberapa UPK yang tidak melibatkan musyawarah desa.

5. Dukungan Lembaga Desa maupun pemerintah desa yang masih rendah.

Hal ini perlu diutarakan, karena meskipun UPK tersebut sangat kuat (seperti UPK Anggrek yang telah mendapat berbagai penghargaan) tidak bisa terlepas dari dukungan lembaga yang ada di desa maupun pemerintahan desa sebab pembuatan aturan dan lainnya yang ada kaitannya dengan legalitas akan memerlukan dukungan sehingga hubungan tersebut perlu dilaksanakan secara intensif.

6. Koordinasi antar pengelola program di Kabupaten/Kota belum terjalin maksimal, sehingga menghambat proses pelaksanaan program.

Keunggulan dan Kelemahan pada Program Gerdu-Taskin yang Dijalankan

Melalui hasil pengamatan dan observasi langsung di lapangan, dalam proses operasional dan implementasinya Program Gerdu-Taskin di Desa Pandanrejo ini memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan:

1. Mudahnya Akses Permodalan.
Salah satu alasan utama mengapa masyarakat desa enggan meminjam dana ke perbankan dan lebih suka ke rentenir adalah sulit dan rumitnya proses peminjaman dana kredit perbankan. Oleh karena itulah kehadiran Lembaga mikro keuangan UPK Anggrek ini

sangat membantu sekali dalam proses simpan pinjam karena kemudahannya dalam memberikan modal pinjaman, proses administrasi yang sederhana, tidak berbelit-belit dan bunga pinjaman hanya 5 persen.

2. Jajaran Pengurus yang Kompeten, Berkomitmen dan Berdedikasi.

Aspek utama dalam pengelolaan sebuah lembaga (organisasi) agar terwujud *Good Corporate Governance* dibutuhkan adanya pihak manajemen yang berkompeten dan kredibel sehingga mampu menjalankan roda operasionalnya lembaga (organisasi) secara efektif dan efisien. Hal inilah yang masih jarang dijumpai dalam lembaga pemerintah. Berbeda sekali dengan keadaan kepengurusan UPK Anggrek, dalam proses usahanya mereka secara tidak langsung telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, salah satunya dengan menerapkan terciptanya transparansi dan keterbukaan dalam proses informasi dan pengelolaan keuangannya kepada masyarakat serta publik.

3. Partisipasi dan dukungan dari berbagai komponen dan pihak terkait.

Kehadiran Lembaga UPK Anggrek ini dalam mengelola dana bantuan Program Gerdu Taskin mendapatkan banyak dukungan dari segenap warga Desa Pandanrejo, hal ini tampak dari tingginya minat partisipasi warga dalam meminjan dana modal usaha dan kerja sama yang baik antara UPK Anggrek dengan masyarakat dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Misalnya: memperbaiki jalan dan jembatan rusak, pemberian Raskin terhadap penduduk miskin, pembangunan jamban umum dan lain-lain.

Kelemahan:

1. Tidak mempunyai Badan Hukum yang tetap dan jelas.
Kelemahan mendasar dari UPK Anggrek ini terletak masih belum jelasnya aspek badan hukum lembaga ini. Suatu hal yang ironis sebuah lembaga yang sudah berdiri 6 tahun masih belum mempunyai status badan hukum yang tetap dan jelas. Dikhawatirkan kemudian hari bila terjadi masalah terutama berhubungan dengan eksekusi, lembaga ini akan dirugikan.
2. Belum Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) Proses peminjaman dana modal jasa simpan pinjam kepada nasabah.
Pembuatan *Standard Operating Procedure* (SOP) sangat dibutuhkan dalam sebuah lembaga (organisasi), alasannya SOP ini akan digunakan sebagai dasar, tuntunan dan patokan dalam menjalankan suatu jenis usaha serta menilai apakah selama ini lembaga/ organisasi tersebut sudah menjalankan proses operasional bisnis usahanya secara efektif dan efisien. SOP ini juga membantu terbentuknya sistem pengawasan internal (SPI) yang tangguh dan kuat dalam organisasi. Namun sayang, pembuatan SOP ini masih belum ada di beberapa UPK di Kabupaten Malang, khususnya SOP peminjaman dana simpan pinjam terhadap nasabah. Terlepas dari masih kecilnya skala dan pangsa pasar operasional UPK, sudah seyogyanya UPK memiliki SOP untuk menghindari terjadinya kecurangan yang diakibatkan nasabah yang bisa merugikan UPK sendiri.
3. Lemahnya *political will* pemerintah.
Dalam menunjang keberhasilan dan kesuksesan Program Gerdu Taskin sangat dibutuhkan sekali partisipasi,

dukungan dan bantuan pemerintah sebagai regulator pembuat kebijakan. Namun sayangnya dalam realitanya keberpihakan pemerintah terhadap Program ini masih rendah, terlihat dari masih sedikitnya kucuran dana yang diberikan pemerintah untuk bantuan program ini setiap tahunnya. Bahkan dalam 6 tahun terakhir bantuan dana Gerdu Taskin pemerintah untuk UPK Anggrek hanya tercatat Rp 156.700.000,00. Melihat betapa tingginya angka kemiskinan di daerah Malang Selatan, khususnya di daerah Pandanrejo, Pagak, nilai bantuan tersebut masih kecil karena setidaknya dibutuhkan bantuan dana minimal Rp 50.000.000,00 per tahunnya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan lapangan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Program Gerdu-Taskin melalui lembaga Unit Pengelola Keuangan (UPK) berperan efektif dan penting dalam memberdayakan dan meningkatkan kemandirian usaha masyarakat, khususnya di daerah penelitian di wilayah selatan Kabupaten Malang.
2. Peran Program Gerdu-Taskin melalui lembaga Unit Pengelola Keuangan (UPK) Anggrek sebagai salah satu daerah penelitian, berperan efektif dan penting dalam meningkatkan pengembangan kelembagaan desa.
3. Masalah terbesar dalam perekonomian nasional ialah masih tingginya tingkat ketimpangan/kesenjangan ekonomi antar daerah yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Program Gerdu-Taskin ini

berperan penting dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang.

4. Beberapa permasalahan yang selama ini terjadi dalam operasional Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang ialah terbatasnya modal, masih adanya pemangkasan dana, kredit macet, masih dominasinya aparat desa, dukungan lembaga desa maupun pemerintah desa yang masih rendah, serta koordinasi antar pengelola program di Kabupaten/Kota belum terjalin maksimal.
5. Beberapa keunggulan dalam Program Gerdu-Taskin yang dijalankan oleh UPK di daerah penelitian di Kabupaten Malang ialah mudahnya akses permodalan, pihak manajemen pengurus yang kompeten, berdedikasi dan berkomitmen serta partisipasi dukungan dari semua pihak yang terkait, khususnya masyarakat sekitar. Dilain pihak dalam pelaksanaannya Program ini masih mempunyai beberapa kelemahan, antara lain: belum mempunyai badan hukum yang jelas dan tetap, belum adanya *Standard Operating Procedure (SOP)* proses peminjaman dana simpan pinjam, dan lemahnya *political will* pemerintah.

Saran

Untuk mencapai keberhasilan Program Gerdu-Taskin ke depannya, maka dapat diberikan beberapa saran, antara lain:

1. Lembaga Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebaiknya mempunyai badan hukum sendiri dengan cara mendaftarkannya ke Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) sehingga lembaga ini mempunyai kepastian hukum yang jelas.
2. Lembaga Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebaiknya membuat *Standard Operating Procedure (SOP)* peminjaman

dana simpan pinjam terhadap nasabah.

3. Program Gerdu-Taskin yang dilaksanakan di Kabupaten Malang melalui lembaga Unit Pengelola Keuangan (UPK), khususnya UPK Anggrek sebagai UPK terbaik di Jawa Timur layak menjadi *role model* percontohan bagi desa-desa lainnya.
4. Pemerintah melalui pemerintah daerah sebaiknya menambah alokasi dana bantuan program Gerdu-Taskin di daerah-daerah dan mengalokasikannya rutin setiap tahunnya.
5. Perlunya tenaga pendamping yang kapabel dalam mengelola program, untuk membantu upaya penyelesaian terhadap berbagai hambatan, terutama yang berkaitan dengan persoalan birokrasi yang rumit.
6. Program Gerdu Taskin harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada yaitu dengan melibatkan secara penuh partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badaruddin. 2008. *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Melalui Pemanfaatan Potensi Modal Sosial, alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia*; Pidato Pengukuhan Guru besar Universitas Sumatera Utara. Tidak diterbitkan.
- Bank Dunia. 2006. *Kemiskinan di Indonesia Belum Terentaskan*. Jurnal.
- BAPPENAS & Pusat Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian Rakyat. Yayasan Agroekonomika. 1996. Menuju Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Kajian Bersama Pengembangan Kebijakan. Jakarta.

- Djawahir, Ahmad H. 1999. *Manajemen Konsultansi: Pelatihan Konsultan Muda*. Malang: LPM Unibraw.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Ibrahim, Linda D. 2006. *Memfaatkan Modal Sosial Komunitas Lokal Dalam Program Kepedulian Korporasi*. Dalam *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG*. Vol. 1. No. 2.
- Ibrahim, yacob. 1998. *Studi Kelayakan Bisnis*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ismawan, Bambang. 2000. *Pemberdayaan Orang Miskin, Refleksi Seorang Pegiat LSM*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. (1st ed.). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Penerbit UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta. Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Cetakan kedua puluh empat. Penerbit Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Muslimin. 2002. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Malang: Penerbit Bayu Media dan UMM Press.
- Nasikun. 1995. *Kemiskinan di Indonesia Menurun, dalam Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasan* (Bagong Suyanto, ed): Airlangga University Press.
- NASIKUN. 2001. *Bahan Kuliah ; Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- O'Connell, J. 1982. *Welfare Economic Theory*, Auburn House Publishing. Boston.
- Ostrom, Elinor. 1993. *Crafting Institution, Self-Governing Irrigation Systems*. San Fancisco: ICS Press.
- Kabupaten Malang Dalam Angka 2010*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 2010.
- UNDP. 2005. *Kajian Kebutuhan Papua, Ringkasan Temuan dan Pengaruh terhadap Perumusan Program Bantuan Pembangunan*.
- Prayitno, Hadi & Budi Santosa. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
- Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Rose, Richard. 1999. "Getting Things Done in an Antomodern Society: Social Capital Networks in Rusia". Dalam Partha Dasgupta dan Ismail Serageldin (ed.). *Social Capital: A Multifaceted Perspective* Washington: The World Bank.

- Santosa, H. W. 2003. *Peta Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Setiap Kota/Kabupaten di Propinsi Jawa Timur Tahun 1999*, Cetakan I. Bayumedia Publishing Malang.
- Soetomo, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya?)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetrisno, Loekman. *Memberdayakan Rakyat Dalam Pembangunan Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat (Anggito Abimanyu, dkk)* (Yogyakarta: PAU-Se UGM bersama BPFE UGM, 1995)
- Sumodiningrat, G. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA. Yogyakarta.
- Sudomingrat, G. 2003. Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait dengan Kebijakan Otonomi Daerah. *Jurnal*.
- Suryahadi, Asep dan Sumarto. 2001. "Memahami Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia." *Smeru Newsletter*, No.03, Mei – Juni.2001.
- Tambunan, T. 2006. Apakah Pertumbuhan di Sektor Pertanian Sangat Krusial Bagi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal*.
- Tambunan, Tulus. 2006. *Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris*, Cetakan II. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- United Nations (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development*. General Assembly Resolution 42/187, 11 December 1987. Retrieved from <http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm>. 28 July 2010.
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho. 2006. *Manajemen Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- UNDP. 2005. *Kajian Kebutuhan Papua, Ringkasan Temuan dan Pengaruh terhadap Perumusan Program Bantuan Pembangunan*.
- World Bank.1998. "The Initiative on Defining, monitoring and Measuring Social Capital: Text of Proposal Approved for Funding". *Social Capital Initiative Working Paper No. 2*. The World Bank, Social Development Family, Environmentally and Socially Sustainable Development Network. <http://www1.worldbank.org/prem/poverty/capital/wkrppr/sciwp2.pdf>. 9 Mei 2005.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perpektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jogjakarta:Ar-Ruzz Media.